



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon (0293) 491004 Faximile (0293) 491040
Laman :www.temanggungkab.go.id Pos-el: info@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 180/1411 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 180/267
TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya tambahan beberapa usulan rancangan peraturan bupati dari beberapa perangkat daerah yang perlu disusun pada tahun 2025, perlu mengubah Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/267 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/949 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/267 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/267 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/267 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/949 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/267 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/267 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Oktober 2025



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 180/1411 TAHUN 2025
TANGGAL 1 OKTOBER 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
1.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN	DINKES
2.	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	DINKES
3.	REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKES
4.	PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKES
5.	PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	RSUD
6.	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	RSUD
7.	PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	RSUD
8.	PEMUNGUTAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	RSUD
9.	PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	RSUD
10.	RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS	DINSOS
11.	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	DINSOS
12.	PEMANFAATAN RUMAH SINGGAH SEMARANG DAN YOGYAKARTA BAGI WARGA KABUPATEN TEMANGGUNG	DINSOS
13.	GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2024-2045	DPPPAPPKB
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA	DPPPAPPKB

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
15.	DESA/KELURAHAN PERWUJUDAN MASYARAKAT TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINDUKCAPIL
16.	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG	DINDUKCAPIL
17.	KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029	BPBD
18.	KEMUDAHAN AKSES KEADAAN DARURAT BENCANA	BPBD
19.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI	DINDIKPORA
20.	SISTEM PENERIMAAN MURID BARU	DINDIKPORA
21.	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN	DINDIKPORA
22.	PERIZINAN, PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN	DINDIKPORA
23.	PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG	DINDIKPORA
24.	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN	DINDIKPORA
25.	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH	DINDIKPORA
26.	PEMBIAYAAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR	DINDIKPORA
27.	DESAIN OLAHRAGA DAERAH	DINDIKPORA
28.	BADAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OLAHRAGA	DINDIKPORA
29.	PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI	DINDIKPORA
30.	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026	DINPERMADES
31.	TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI TAHUN ANGGARAN 2026	DINPERMADES
32.	STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2026	DINPERMADES
33.	TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA	DINPERMADES
34.	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS ADMINISTRASI DESA DI KECAMATAN BANSARI	DINPERMADES
35.	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS ADMINISTRASI DESA DI KECAMATAN TLOGOMULYO	DINPERMADES

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
36.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	DINPERMADES
37.	PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA	DINPERMADES
38.	PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP	DINPUSIP
39.	PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS	DINPUSIP
40.	PEDOMAN PENERAPAN APLIPASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI	DINPUSIP
41.	PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	DINPUSIP
42.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKOMINFO
43.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN IKLAN LPPL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKOMINFO
44.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ERTE FM KABUPATEN TEMANGGUNG, DENGAN USULAN PERBUP PERUBAHAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ERTE FM KABUPATEN TEMANGGUNG	DINKOMINFO
45.	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	DINKOMINFO
46.	PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINKOMINFO
47.	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI	DINKOMINFO
48.	PENYELENGGARAAN KABUPATEN TEMANGGUNG CERDAS	DINKOMINFO
49.	MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	DINKOMINFO
50.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	DINKOMINFO
51.	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045	DPUPR

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
52.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	DPUPR
53.	RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI	DPRKPLH
54.	RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2045	DPRKPLH
55.	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	DPRKPLH
56.	KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA	DPRKPLH
57.	PENGURANGAN SAMPAH DARI RUMAH TANGGA	DPRKPLH
58.	PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK, WADAH DAN KEMASAN MAKANAN/MINUMAN BAHAN PLASTIK	DPRKPLH
59.	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	DPRKPLH
60.	PELATIHAN SWADANA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG	DINPERINAKER
61.	PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	DKPPP
62.	PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DKPPP
63.	PENYELENGGARAAN PERIKANAN	DKPPP
64.	PERLINDUNGAN PETANI	DKPPP
65.	PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP
66.	TATA CARA DAN PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN TEMANGGUNG	DPMPTSP
67.	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH	DINBUDPAR
68.	PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	DINKOPDAG
69.	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026	BAPPEDA

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
70.	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	BAPPEDA
71.	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025	BAPPEDA
72.	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	BAPPEDA
73.	RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029	BAPPEDA
74.	RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI TAHUN 2025-2029	BAPPEDA
75.	RENCANA STRATEGIS SANITASI TAHUN 2025-2029	BAPPEDA
76.	KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH AIR MINUM TAHUN 2025-2045	BAPPEDA
77.	INOVASI DAERAH TAHUN 2025	BAPPEDA
78.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 126 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	BAPPEDA
79.	PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	BAPPEDA
80.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM
81.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM
82.	KESEJAHTERAAN, PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, DAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM
83.	PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM
84.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2022 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
85.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN TALENTA DAN RENCANA SUKSESI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BKPSDM
86.	PEDOMAN MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	BKPSDM
87.	TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	BPKPAD
88.	MONITORING PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK	BPKPAD
89.	TATA CARA BAGI HASIL OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA DESA TAHUN 2025	BPKPAD
90.	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	BPKPAD
91.	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BPKPAD
92.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BPKPAD
93.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	BPKPAD
94.	SISTEM ONLINE/ELEKTRONIK PAJAK DAERAH	BPKPAD
95.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BPKPAD
96.	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	BPKPAD
97.	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025	BPKPAD
98.	STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026	BPKPAD
99.	ANALISA STANDAR BELANJA	BPKPAD

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
100.	HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN	BPKPAD
101.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025	BPKPAD
102.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025	BPKPAD
103.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2026	BPKPAD
104.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BPKPAD
105.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH KHUSUSNYA KENDARAAN DINAS BERMOTOR OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINGAH KABUPATEN TEMANGGUNG	BPKPAD
106.	BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SETWAN
107.	PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SETWAN
108.	BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SETWAN
109.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TELAAH INTERN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	INSPEKTORAT
110.	PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA	INSPEKTORAT
111.	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	INSPEKTORAT
112.	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH APOTIK WARINGIN MULYO KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN PEREKONOMIAN
113.	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BHUMI PHALA WISATA KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PEMRAKARSA
114.	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK TEMANGGUNG	BAGIAN PEREKONOMIAN
115.	ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN PEREKONOMIAN
116.	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN HUKUM
117.	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PESANTREN	BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL
118.	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH	BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL
119.	KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH (25 PERANGKAT DAERAH)	BAGIAN ORGANISASI
120.	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH (25 PERANGKAT DAERAH)	BAGIAN ORGANISASI
121.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS	BAGIAN ORGANISASI
122.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	BAGIAN ORGANISASI
123.	PAKAIAN DINAS	BAGIAN ORGANISASI
124.	ANALISIS JABATAN	BAGIAN ORGANISASI
125.	ANALISIS BEBAN KERJA	BAGIAN ORGANISASI
126.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
127.	PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	BAGIAN PEMBANGUNAN
128.	PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BAGIAN PEMBANGUNAN
129.	PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2026	BAGIAN PROKOMPIM
130.	CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN TEMANGGUNG	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA


 a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

 RIPTO SUSILO